

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan mengandung informasi yang berguna untuk beberapa pihak dalam mengambil sebuah keputusan, baik pihak eksternal maupun pihak internal. Pada awalnya laporan perusahaan hanya berisi laporan keuangan saja yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan, lalu perusahaan menyediakan informasi-informasi *non financial* yang dilaporkan secara terpisah pada laporan manajemen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tetapi seiring dengan perkembangan informasi setiap waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan beberapa pihak, laporan keuangan dan laporan manajemen dianggap kurang efisien jika dilaporkan secara terpisah dan kurang cukup dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi para investor ataupun kreditor. Sehingga dibuatlah laporan yang lengkap terintegritas, dimana laporan ini sudah mencakup laporan *financial* dan *non financial* dalam satu laporan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan yang sesuai dengan kepentingan para *Stakeholders*.

Laporan Terintegritas (*Integrated Reporting*) yang dikembangkan oleh *International Integrated Reporting Council* (IIRC) pada tahun 2013 dan didukung oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI). IIRC mendefinisikan *Integrated Reporting* yaitu :

*“A process that results in communication by an organization, most visibly a periodic integrated report, about how an organization’s strategy, governance, performance, and prospects lead to the creation of value over the short, medium and long-term”.*

Sehingga setiap tahunnya perusahaan *go publik* menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) yang meliputi seluruh aktivitas perusahaan selama setahun seperti informasi *financial* maupun *non financial* terkait kinerja perusahaan serta pertanggungjawaban manajemen dalam mengantisipasi kondisi ekonomi perusahaan meliputi strategi perusahaan, tata kelola, kinerja keuangan, dan SCR pada kontek ekonomi operasi perusahaan. Sehingga dapat membantu dalam mengambil suatu keputusan, yang mencangkup kinerja perusahaan untuk para *stakeholders* dan menyajikan informasi mencangkup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek organisasi yang dapat meningkatkan *value* terhadap perusahaan (Kustiani, 2017).

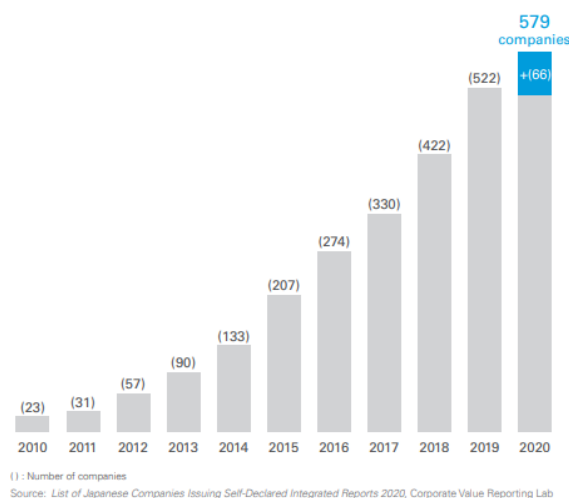
Penelitian terkait *Integrated Reporting* ini merupakan hal yang baru di Indonesia, bentuk laporan tahunan dengan *Integrated reporting* masih menjadi pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), namun telah mulai mempersiapkan untuk menjalankan IR (Ahmad & Sari, 2017) sehingga diatur dalam PSAK 1 (2018) paragraf 14 yang berisi tentang perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dan laporan non keuangan dapat menjadi nilai tambah yang lebih spesifik terhadap nilai industri dan yang dianggap penting untuk pengguna. Sedangkan regulasi resmi yang digunakan di Indonesia untuk menyusun laporan tahunan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK/2016 tentang Laporan Emiten atau perusahaan publik.

Menurut IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) seiring berjalannya waktu, *Integrated Reporting* diharapkan dapat menjadi norma korporat. Dengan adanya panduan dan standar yang komprehensif, yang menangani pengukuran dan pengungkapan yang efektif. Penilaian kualitas pelaporan terintegritas yaitu dengan *integrated reporting quality* untuk mencapai transparansi dan komparabilitas laporan yang dipublikasikan berdasarkan kerangka *integrated reporting* salah satunya yaitu keadaan individu perusahaan.

Pada pasar modal Indonesia (Bursa Efek Indonesia) menerapkan IDX *Industrial Classification* (IDX-IC) untuk mengklasifikasikan perusahaan tercatat. BEI dapat menentukan klasifikasi perusahaan berdasarkan evaluasi dan justifikasi, Maka terdapat empat tingkat klasifikasi yaitu terdapat 12 sektor, 35 sub sektor, 69 industri, dan 130 sub industri berdasarkan pada eksposur pasar. Sektor-sektor tersebut diantaranya yaitu: Sektor *Energy*, Sektor *Basic Materials*, Sektor *Industrials*, Sektor *Consumer Non Cyclical*s, Sektor *Consumer Cyclical*s, Sektor *Healthcare*, Sektor *Financial*, Sektor *Property and Real Estate*, Sektor *Technology*, Sektor *Infrastruktur*, Sektor *Transportation & Logistics*, dan Sektor *Listed Investment Product*.

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang sudah menyatakan telah menerapkan *integrated reporting* diantaranya terdapat sektor *basic materials* yaitu: PT. Aneka Tambang, Tbk., Semen Indonesia, Tbk., PT. *United Tractors*, Tbk., dan PT. Pertamina, Tbk. Selain sudah mengikuti tuntutan global, *Integrated Reporting* membuat dampak yang jelas. (Kurniawan et al., 2020), (Bananuka et al., 2019).

*Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)* adalah organisasi akuntansi terbesar di dunia telah menerbitkan Survei *Integrated Reporting* pada tahun 2020 di Jepang, terdapat 579 Perusahaan yang menerbitkan laporan terintegritas yang dideklarasikan pada tahun 2020 bertambah 66 perusahaan jika dibandingkan dengan tahun 2019, meskipun pertumbuhan sedikit lambat namun terlihat setiap tahunnya meningkat secara konsisten. Selain itu, Jumlah bisnis yang mengidentifikasi masalah melalui pelaporan terintegritas meningkat, maka menyadari bahwa pentingnya pengungkapan aset berwujud dan tidak berwujud untuk membantu transparansi dan akuntabilitas pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan bisnis.



**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Perusahaan Di Jepang yang Telah Menerapkan *Integrated Reporting***

Sumber : *Survey of Integrated Reporting –KPMG Japan, 2020*

Penerapan *Integrated Reporting* penting bagi para investor sebagai informasi tambahan untuk melihat dan menilai kinerja suatu perusahaan, karena

jika hanya dengan sebuah laporan keuangan saja besar kemungkinan jika terdapat manipulasi angka-angka. Oleh karena itu Di Indonesia, fenomena mengenai *integrated reporting* erat hubungannya dengan pelaporan yang tidak lengkap dan tidak terintegrasi.

Selain itu fenomena terkait *Integrated Reporting* dikutip dari website CNBC Indonesia terdapat kasus mengenai manipulasi Laporan Keuangan Tahunan (LKT) pada tahun 2019 yaitu pada PT. Envy Technologies Indonesia Tbk, dan anak perusahaannya yang bergerak dalam bidang teknologi informasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terungkap dalam informasi yang disampaikan oleh manajemen Envy dalam suratnya kepada BEI pada 21 Juli 2021 suratnya menyebutkan terkait dugaan manipulasi atas laporan keuangan anak usahanya yaitu PT Ritel Global Solusi (RGS) tahun 2019. BEI mempertanyakan mengenai angka-angka keuangan RGC yang dikonsolidasikan ke laporan keuangan tahunan 2019 ENVY tetapi RGS disebutkan tidak menyusun Laporan keuangan tersebut, maka BEI meminta tanggapan ENVY terhadap tuduhan/dugaan manipulasi data RGS dalam laporan keuangan 2019. Hal tersebut dilakukan agar membuat para investor terkesan dan percaya dengan laporan keuangannya baik juga meyakinkan walaupun pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Fenomena ini menunjukkan lemahnya integritas laporan keuangan yang disajikan perusahaan melibatkan banyak pihak, mulai dari pihak internal sampai pihak eksternal. Terungkapnya ketidakjujuran perusahaan dalam menyajikan

laporan keuangan berdampak pada merosotnya kepercayaan masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya harga saham dari perusahaan.

Salah satu hal yang dapat meningkatkan laporan yang terintegritas yaitu dengan transparansi dan kualitas, Ukuran KAP Cukup efektif dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan. Menurut Ghani et.al (2018), menyebutkan bahwa ukuran KAP memiliki peran terhadap penerapan *Integrated Reporting*, yang artinya manajemen akan menggunakan *integrated reporting* dalam laporan keuangan karena memiliki ukuran firma yang besar. Hal tersebut didukung dengan argumen bahwa perusahaan yang besar memiliki KAP yang berukuran besar, karena perusahaan besar memiliki tuntutan pelaporan yang tidak sederhana sehingga mereka membutuhkan auditor yang kompeten untuk menanganinya.

Terdapat kasus mengenai Ukuran KAP yang dikutip dari IDN Times (2020) yaitu kasus Problem audit Jiwasraya, Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi tertua di Indonesia bengkaknya keuangan perusahaan menjadi semakin banyak diperbincangkan oleh berbagai media. Menurut Kantor Akuntan Publik dalam konferensi pers IAPI pada bulan Januari disebutkan bahwa terdapat kejangalan dalam laporan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan angka yang mencengangkan. Puncak dari permasalahan tersebut muncul setelah kabar gagalnya Jiwasraya dalam membayar polis asuransi, kegagalan ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama penyebab utamanya adalah kesalahan dalam pengelolaan investasi yang ada di dalam perusahaan. Bahwa diketahui Jiwasraya sudah mengalami kesulitan dalam hal tata kelola investasi sejak tahun

2002. Dalam kondisi yang masih sulit ini, Jiwasraya malah memperparah keadaan dengan menambah pengeluaran yang tidak membuat kondisi menjadi lebih baik, yaitu mensponsori tim sepak bola dunia Manchester City pada tahun 2014. Tidak hanya itu Jiwasraya juga melakukan investasi dengan menaruh dana di saham-saham yang tidak memiliki performa tidak baik, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Jiwasraya menempatkan 96% dana investasinya di saham “sampah” yaitu dana mencapai Rp. 5,7 triliun. Jiwasraya melakukan investasi yang berkinerja buruk dengan berbagai investasi reksadana yaitu sebesar Rp.14,9 triliun. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah adanya indikasi *fraud* dalam kinerja Jiwasraya, berdasarkan keterangan BPK Jiwasraya membekukan laba semu sejak tahun 2006-2017. Dalam kasus Jiwasraya, proses audit sesungguhnya sudah dilakukan berkali-kali baik proses audit dari auditor internal, auditor independen atau akuntan publik, dan auditor pemerintah. Pada saat akuntan publik memberikan opini tidak wajar terhadap laporan keuangan, dan ditemukan ketidaktepatan pada bagian keuntungan sebesar Rp. 360 miliar tetapi Jiwasraya tidak memperbaiki akibat lemahnya sistem pengendalian internal sehingga membiarkan hal ini terjadi.

Bentuk kecurangan tersebut tentu akan merugikan berbagai pihak mulai dari internal perusahaan, para pemangku kepentingan bahkan negara. Apabila kita refleksikan bersama, adanya indikasi *fraud* yang ditujukan pada Jiwasraya tidak terlepas dari lemahnya sistem pengendalian internal yang telah dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah resolusi baru sebagai bentuk usaha yang bersifat preventif. COSO'S *Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework*,

alat Mitigasi *Fraud* Selama dua dekade terakhir, lingkungan bisnis mengalami perubahan dramatis dan semakin kompleks. Kehadiran teknologi menuntut terkomputerisasinya segala kegiatan perusahaan. Hal ini bertujuan demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas sistem pengendalian internal perusahaan dalam pengambilan keputusan juga dalam rangka membentuk tata kelola perusahaan yang baik.

Kantor Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran serta memiliki kualitas audit atas laporan keuangan yang rendah. Kualitas audit yang rendah akan berpengaruh negatif pada citra Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan baik bagi klien maupun bagi masyarakat.

Ukuran Perusahaan juga mempunyai pengaruh dalam menghasilkan laporan keuangan, perusahaan besar cenderung mempunyai manajemen yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dibandingkan perusahaan kecil. Pada dasarnya hanya terdapat tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan dapat menjadi penentu kemudahan perusahaan untuk mendapatkan dana dalam pasar modal. Perusahaan yang besar bisa memilih bentuk pendanaan dari berbagai utang yang memiliki keuntungan lebih spesial.

Fenomena selanjutnya dikutip dari [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id) mengenai ukuran perusahaan, yaitu terjadi pada Garuda Indonesia, Kondisi Keuangan Garuda Indonesia memang dalam kondisi yang tidak baik. Semester I 2021 perusahaan mencatat kerugian bersih senilai US\$ 898,65 juta atau dalam rupiah mencapai Rp



12,85 triliun. Catatan kerugian tersebut bahkan naik sejak triwulan I Tahun 2021 senilai US\$ 384,35 juta atau dalam rupiah sebesar Rp. 5,57 triliun. Namun masalah utama gugatan-gugatan terhadap Garuda adalah disebabkan karena hutangnya yang semakin membengkak sampai dengan Rp. 70 triliun. Sebagian besar utang tersebut merupakan utang yang berasal dari beban sewa pesawat (*leasing*) yang pada tahun-tahun sebelumnya disajikan secara tidak tepat dalam laporan keuangannya.

Salah satu penyebabnya yaitu terjadi pada saat penyebaran *Covid-19* mulai awal tahun 2020 jelas semakin memburuk keuangan perusahaan. Pendapatan Garuda semakin menurun sebagai akibat sepi penumpang dan adanya pembatasan pergerakan masyarakat baik secara domestik, maupun antar negara. Beban perusahaan masih sangat tinggi, walaupun berhasil dipangkas dengan berbagai upaya restrukturisasi. Beban usaha pada semester I menjadi US\$ 1,380 miliar, turun dari periode yang sama pada tahun lalu di posisi US\$ 1,643 miliar. Dengan kondisi ini jelas terlihat utang Garuda akan semakin bertambah setiap harinya. Mengutip penjelasan Kementerian BUMN, kerugian Garuda akan meningkat 100 juta dollar atau sekitar 1,43 triliun rupiah setiap bulannya. Hal inilah akhirnya memicu opsi untuk membiarkan Garuda pailit, untuk selanjutnya membangun perusahaan baru atau digantikan dengan perusahaan lain dengan kondisi keuangan yang lebih sehat. Negosiasi ulang dengan para *lessor* harus dilakukan, terlebih bagi *lessor* yang memiliki hubungan dengan kasus-kasus korupsi. Garuda juga perlu mengurangi jenis armada agar bisa menjadi lebih efisien untuk pelatihan awak dan perawatan pesawat. Keputusan untuk

menyelamatkan atau melikuidasi Garuda pada akhirnya harus diambil oleh pemerintah dengan pertimbangan yang komprehensif. Namun jika boleh berharap, maka pertimbangan terbesar yang perlu dilihat adalah kelayakan dari bisnis Garuda itu sendiri dan prospek ekonominya ke depan.

Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa utang Garuda Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya akhirnya demi menyelamatkan Garuda Indonesia membuat keputusan akhirnya diambil oleh pemerintah. Namun dengan meningkatnya hutang akan membuat nilai perusahaan itu mengalami penurunan karena biaya yang dipakai lebih besar, sehingga mempengaruhi aset yang dimiliki perusahaan. Hutang dan Ukuran Perusahaan juga memiliki kaitan, dimana ukuran perusahaan adalah hasil dari total aset, penjualan, dan *log size* yang besar untuk menunjukkan kemampuan emiten. (Sagala dkk, 2020)

Selain itu, Komite Audit juga memiliki pengaruh dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi praktik *integrated reporting*. Pembentukan komite audit (komite dewan komisaris) dan fungsi audit internal diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan, Komite audit yang lebih aktif dan terlibat secara langsung dalam proses pelaporan dapat memastikan bahwa informasi keuangan maupun non keuangan yang disajikan dalam pelaporan yang terintegritas akurat dan terpercaya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja perusahaan secara umum. Komite audit dibentuk dalam rangka mengoptimalkan kinerja dewan komisaris. Dengan adanya pengawasan yang optimal dari dewan komisaris akan membantu mengelola perusahaan dengan efisien dan efektif sesuai dengan aturan dan perundangan yang

berlaku. Di Indonesia keberadaan komite audit menjadi kurang efektif disebabkan oleh kurangnya kualitas anggota, tugas dan tanggung jawab komite audit yang belum jelas, tidak lancarnya aliran komunikasi antara dewan komisaris, dewan direksi, peran komisaris yang oportunistik, pemahaman fungsi komite audit yang rendah.

Terdapat kasus pelaksanaan peran Komite Audit yang kurang berfungsi yaitu dikutip dari [jamberita.com](http://jamberita.com) yaitu kasus dugaan korupsi pada perusahaan BUMN perikanan Indonesia mengenai pengelolaan keuangan dan dugaan kasus korupsi PT Pupuk Sriwijaya tentang potensi kerugian keuangan perusahaan terkait pupuk non subsidi dan pembangunan pabrik II B yang saat ini dalam proses penyidikan oleh Kejati Sumatera Selatan. Terdapat dua potensi penyebab terjadinya kecurangan pada laporan keuangan yaitu ketidakpahaman dan kelalaian pencatatan laporan keuangan, hal ini disebabkan karena faktor *human error*. Maka sebaiknya dewan komisaris melalui komite audit pada PT. Pusri meminta KAP yang ditunjuk perusahaan untuk melakukan audit mengenai prosedur yang telah disepakati untuk proses pembangunan pabrik II B maka hasil inilah yang menjadikan proses hukum.

Hal tersebut menunjukkan tidak lancarnya aliran komunikasi antara dewan komisaris, maka pentingnya peran dewan komisaris melalui komite audit, komite audit harus cepat tanggap dalam menyerap informasi dalam pengawasan terhadap operasional perusahaan. Jika sedikitpun informasi mengenai adanya kecurangan harus segera diselesaikan secara internal melalui peran komite audit. Menurut Arens peran komite audit harus memberikan pengawasan manajemen risiko dan

kegiatan pengendalian internal dan mencegah masalah terjadi, agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

Semakin besar ukuran kantor akuntan publik dan Ukuran Perusahaan maka semakin aktif dan terlibat komite audit sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan menerapkan *integrated reporting*.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, diharapkan dapat meningkatkan mutu dalam laporan tahunan dengan menerapkan elemen *Integrated Reporting* agar laporan keuangan tahunan menjadi lebih ringkas dan jelas sehingga memudahkan para investor untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* (Studi pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih adanya manipulasi laporan keuangan hal tersebut menandakan adanya tindakan yang tidak terintegritas sehingga tidak transparansi yang menyebabkan para investor beranggapan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut terlihat sehat.

2. Masih adanya Kantor Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran serta memiliki kualitas audit atas laporan keuangan yang rendah. Kualitas audit yang rendah akan berpengaruh negatif pada citra Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan baik bagi klien maupun bagi masyarakat.
3. Masih adanya kasus ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutang. Meningkatnya hutang akan membuat pengaruh terhadap nilai perusahaan sehingga nilai perusahaan mengalami penurunan karena biaya yang dipakai lebih besar, sehingga mempengaruhi aset yang dimiliki perusahaan. Hutang dan Ukuran Perusahaan juga memiliki kaitan, dimana ukuran perusahaan adalah hasil dari total aset, penjualan Masih adanya komite audit yang kurang tanggap dalam menanggapi informasi dan pengawasan.
4. Masih adanya kasus peran Komite Audit yang kurang berfungsi, tidak lancarnya aliran komunikasi antara dewan komisaris, maka pentingnya peran dewan komisaris melalui komite audit, komite audit harus cepat tanggap dalam menyerap informasi dalam pengawasan terhadap operasional perusahaan. Jika sedikitpun informasi mengenai adanya kecurangan harus segera diselesaikan secara internal melalui peran komite audit.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Ukuran Kantor Akuntan Publik pada perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
2. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
3. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Komite Audit pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
4. Bagaimana Pengungkapan *Integrated Reporting* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
5. Seberapa besar pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
6. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
7. Seberapa besar pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* pada perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor

*food and beverage* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.

8. Seberapa besar pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik , Ukuran Perusahaan dan Komite Audit terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* pada perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Ukuran Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Komite Audit pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui Pengungkapan *Integrated Reporting* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik , Ukuran Perusahaan dan Komite Audit terhadap Pengungkapan *Integrated Reporting* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini terdapat manfaat yaitu :

1. Kontribusi Teoritis
  - a. Bagi Peneliti



Sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas terkait seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat mengetahui perkembangan penerapan laporan tahunan berbasis *Integrated Reporting* di Indonesia. Serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh Sidang Sarjana Ekonomi prodi Akuntansi Universitas Pasundan.

b. Bagi Perusahaan/Instansi

Sebagai saran dan bahan evaluasi agar menyajikan laporan keuangan berbasis *Integrated Reporting* dengan aspek-aspek yang menggambarkan kondisi terkini yang terkait dengan perusahaan tersebut.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat menjadikan referensi bagi penelitian selanjutnya selama memiliki hubungan dengan objek penelitian.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Sub Sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021. Adapun pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan mengakses situs resmi dari Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs resmi masing-masing perusahaan terkait.

Adapun waktu yang dilakukan oleh peneliti dimulai pada saat disahkannya penelitian ini terhitung dari tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan selesai.